

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2013).

Menurut Boediono (2013) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional (Tambunan, 2012).

Fenomena yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami anomali yaitu pertumbuhan ekonomi menurun, sementara indikator makro dalam negeri cukup positif. Menurut Yusuf Kalla pertumbuhan ekonomi dikuartal ke tiga 2017 mengalami anomali karena indikator

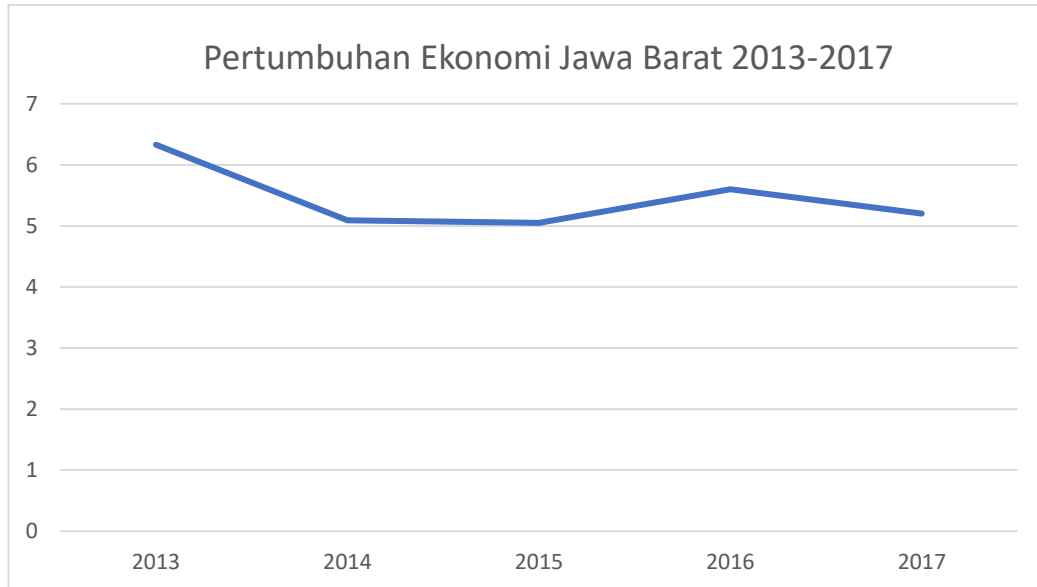
makro ekonomi mengalami kenaikan seperti inflasi tercatat rendah, utang nasional dan harga komoditas relatif terjaga, sedangkan pertumbuhan ekonomi menurun yaitu sebesar 5,06 persen dari target pemerintah sebesar 5,2 persen. Penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi karena rendahnya kontribusi sektor industri. Dimana, sektor industri negara lain lebih besar perannya terhadap perekonomian (cnnindonesia.com).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2013).

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan daerah disebut PDRB. Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan (Jaya dan Dwirandra, 2014).

Struktur perekonomian di Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik yang berbeda dengan provinsi lainya di Indonesia. Berikut laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017

Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat 2013-2017



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Dari grafik di atas dapat dilihat fenomena pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun ini mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2013 diangka 6,33% dan ditahun selanjutnya 2014 sebesar 5,09% tahun 2015 sebesar 5,05% tahun 2016 sebesar 5,6% dan tahun 2017 sebesar 5,2%.

Belanja modal merupakan belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006). Porsi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi belanja modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya diharapkan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah

angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Anggun Dinda, 2017).

Adapun fenomena yang terkait dengan belanja modal yaitu Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2013 sebesar 1.272.779.829, pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1.359.802.565. Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2.298.676.130, dan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 2.859.355.623. Fenomena yang terjadi adalah dimana Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan modal kerja namun tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rubijanto (2012:60) penyerapan anggaran belanja modal (*capital expenditure*) mempunyai efek meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.3
Daftar Tabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat 2013-2017

Tahun	PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi
2013	12.360.109.870	1.272.779.829	6,33 %
2014	15.038.153.309	1.359.802.565	5,09%
2015	15.837.707.187	2.298.676.130	5.05%
2016	17.042.895.113	2.859.355.623	5,6%
2017	16.524.120.917	2.291.591.432	5,2%

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 pasal 157 tentang keuangan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal daerah sehingga kualitas pelayanan publik

semakin baik. Sedangkan sumber kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui Pendapatan Asli Daerah. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila PEMDA ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat maka PEMDA harus menggali PAD yang sebesar-besarnya (Wijayanti, 2017).

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD (Suragih, 2010). Dari perspektif ini seharusnya PEMDA lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak atau retribusi. PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002).

Fenomena yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat adalah pada tahun 2013-2016 mengalami kenaikan. Tahun 2013 sebesar 12.360.109.870, pada tahun 2014 naik menjadi 15.038.153.309. Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 15.837.707.187. Pada Tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 17.042.895.113. Fenomena yang terjadi ialah Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan tiap tahunnya tetapi pertumbuhan ekonomi menurun. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tambunan (2015:51) bahwa pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal ini pun didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cindy Febry (2013) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau Pertumbuhan Ekonomi. Hal senada dikemukakan oleh Lily Kusumawati dan I Gusti Bagus (2018) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Selanjutnya dilakukan oleh Ida Ayu dan Iwayan Ramantha (2018) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul yaitu **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami anomali tahun 2017
2. Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013-2017
3. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2017
4. Terjadi peningkatan belanja modal Provinsi Jawa Barat tetapi tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat
2. Seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat guna diolah untuk dianalisis lebih lanjut

1.4.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis kaji, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Untuk memecahkan masalah yang terkait dengan fenomena umum dan khusus dan data sebagai tambahan informasi bermanfaat mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat

1.5.2 Kegunaan Akademis

1.) Bagi penulis

Peneliti dapat menambah wawasan, pengetahuan serta informasi yang akan berguna dimasa yang akan datang

2.) Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan dalam penelitian yang sama.

